



PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA APBD

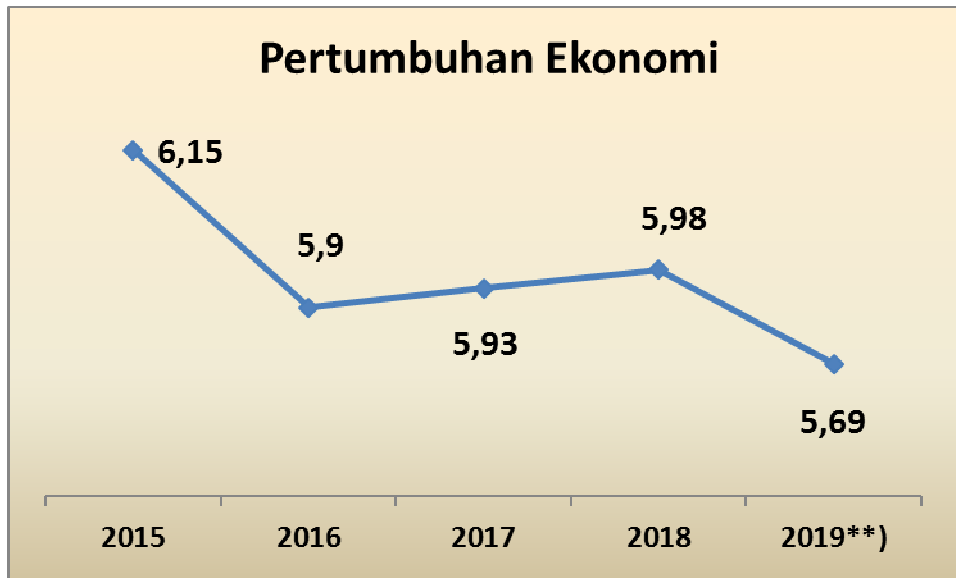
2.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Perkembangan kondisi ekonomi makro Kota Madiun mencerminkan kinerja ekonomi daerah dalam pembangunan dan mengindikasikan sejauh mana kesejahteraan masyarakat daerah Kota Madiun tersebut telah terwujud. Beberapa variabel ekonomi makro terpenting yang menjadi indikator pencapaian pembangunan perekonomian daerah Kota Madiun adalah pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi, pengangguran, dan kemiskinan.

2.1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB (baik ADHB maupun ADHK). Berdasarkan data dari BPS Kota Madiun diketahui bahwa laju pertumbuhan perekonomian Kota Madiun pada Tahun 2019 adalah sebesar 5,69 atau mengalami penurunan sebesar 0,24, akan tetapi dibandingkan provinsi maupun nasional tetap lebih tinggi.

Gambar II. 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2015s.d 2019 (%)

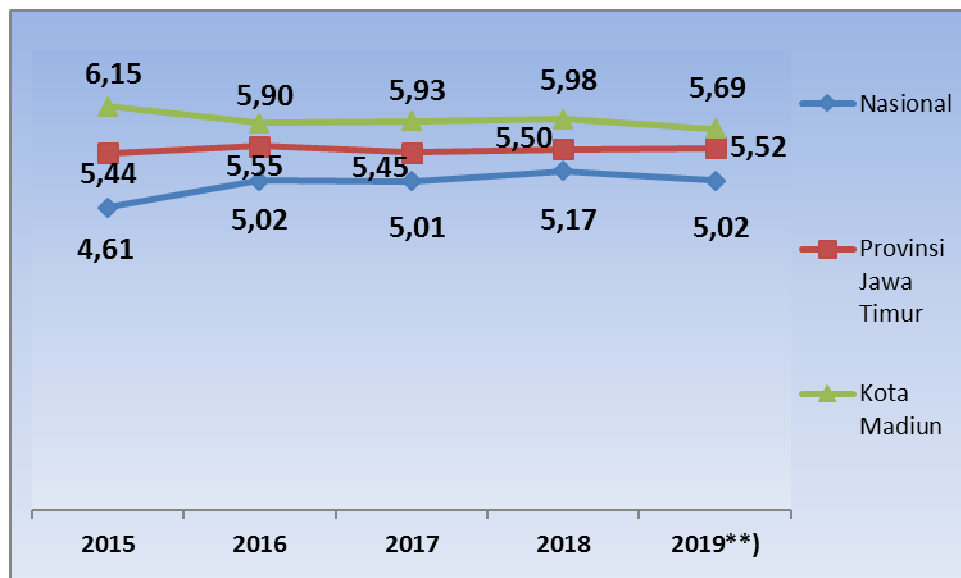


Sumber : BPS Kota Madiun Tahun 2019

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu daerah dari tahun ke tahun yang dapat diindikasikan oleh kenaikan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dari tahun ke tahun. Pengukuran laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) yaitu dengan menghitung pertumbuhan PDRB riil Kota Madiun.

Gambar II.2

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun



Sumber : RKPDTahun 2019

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun periode 2015-2019 menunjukkan terjadi fluktuatif. Namun Pada 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun sedikit mengalami penurunan yakni

hanya sebesar 5,81 persen, akan tetapi masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Dan pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi kota madiun mengalami penurunan lagi sebesar 5,90. Penurunan ini dikarenakan adanya dampak dari perekonomian global, Nasional dan juga regional jawa timur yang juga mengalami penurunan. Sedangkan pada Tahun 2017 mengalami kenaikan lagi sebesar 5,93, dan pada Tahun 2018 menunjukkan adanya kenaikan lagi yaitu sebesar **5,96**. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun yang masih relatif tinggi ini menggambarkan bahwa regulasi dan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah, secara riil mampumenciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ekonomi daerah, dan juga mencerminkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi daerah yang baik.

2.1.2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Capaian kinerja perekonomian suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari perkembangan PDRBnya, baik PDRB atas dasar harga konstan maupun PDRB atas dasar harga berlaku. Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun pada tahun 2015 s.d 2019 dapat dilihat dibawah ini.

Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2015 sampai tahun 2019

Tahun	PDRB		Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2015	10.192,1	8.455,4	6,15
2016	11.185,1	8.954,7	5,90
2017	12.140,2	9.486,1	5,93
2018	13.190,4	9.488,0	5,96
2019**)	14.208,2	10.635,5	5,81

Sumber: KUATahun201*) Angka Sementara

PDRB Kota Madiun terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Terlihat dari nilai PDRB pada tahun 2015 atas dasar harga berlaku sebesar Rp10.192,1 milyar dan atas dasar harga konstan sebesar Rp8.455,4 milyar, terus meningkat hingga mencapai Rp. 14.208,2 milyar untuk harga berlaku dan Rp 10.635,5 milyar untuk harga konstan pada tahun 2019. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai PDRB Kota Madiun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang yang terjadi di tahun tersebut dan naiknya nilai produksi di beberapa sektor ekonomi diantaranya yang cukup signifikan sektor transportasi dan pergudangan; sektor industri pengolahan; dan sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum. Sejalan dengan PDRB atas

dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan juga terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir.

Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 s/d 2019 (%)

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,96	0,92	0,83	0,80	0,75
2	Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3	Industri Pengolahan	16,06	15,88	16,57	16,25	16,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00
6	Konstruksi	6,52	6,51	6,29	6,10	5,87
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	24,83	25,1	24,98	25,71	26,06
8	Transportasi dan Pergudangan	3,15	3,18	3,34	3,42	0,04
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,56	4,64	4,71	4,91	4,98
10	Informasi dan Komunikasi	13,68	13,62	13,59	13,44	13,04
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,37	10,51	10,52	10,28	10,04
12	Real Estate	2,69	2,73	2,63	2,61	2,65
13	Jasa Perusahaan	0,68	0,68	0,68	0,68	0,69
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,23	3,1	3	3,04	3,08
15	Jasa Pendidikan	7,88	7,79	7,67	7,49	7,62
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	1,28	1,28	1,31	1,34
17	Jasa Lainnya	3,80	3,73	3,61	3,64	3,70
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber: RKPD Tahun 2021*) Angka Sementara

Dengan melihat besarnya peranan atau kontribusi dari masing-masing sektor maka struktur perekonomian Kota Madiun pada tahun 2015 sampai tahun 2019 mayoritas ditopang oleh tiga sektor utama yaitu sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor; sektor industri pengolahan dan sektor Informasi dan komunikasi yang secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 55,47%.

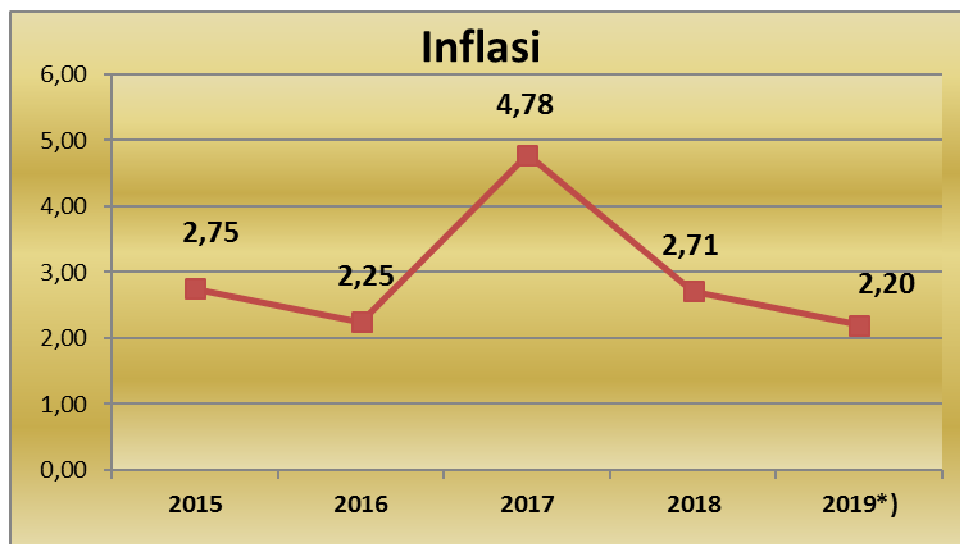
Atas dasar harga konstan kontribusi sektor yang paling dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Madiun pada tahun 2019 yaitu dari sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor; sektor industri pengolahan dan sektor Informasi dan komunikasi. Ketiga sektor tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 54,69%. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan PDRB atas dasar harga

berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut menjadi sektor unggulan di Kota Madiun dalam menopang perekonomian secara makro.

2.1.3. INFLASI

Inflasi merupakan salah satu indikator makro yang mengukur perkembangan kenaikan harga secara umum dalam periode tertentu serta dapat berimplikasi pada kemampuan daya beli masyarakat. Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Inflasi Kota Madiun masih di bawah dua digit yang berarti kondisi perekonomian Kota Madiun relatif masih stabil dan terkendali. Perkembangan capaian inflasi Kota Madiun lebih detail selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut.

Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2015-2019



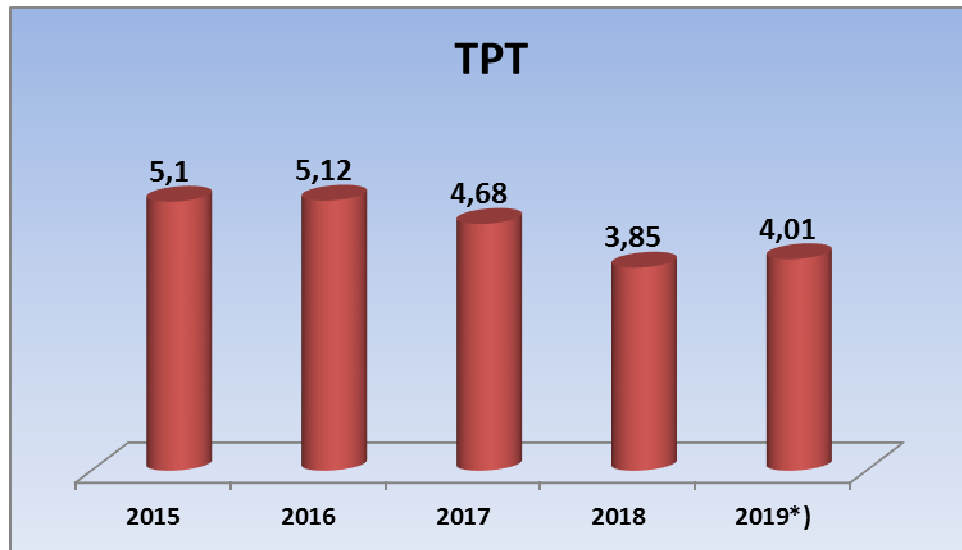
Sumber: RKPD Tahun 2021*) Angka Sementara

Tingkat inflasi di Kota Madiun pada tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, inflasi sempat mencapai 2,75 persen, lalu mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 2,25 persen sedangkan tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 4,78 persen. Pada tahun 2018 inflasi mengalami penurunan lagi secara signifikan sebesar 2,71 persen. Dan di tahun kemarin 2019 mengalami penurunan yang cukup besar menjadi sebesar 2,20, yang berarti inflasi di Kota Madiun semakin terkendali. Secara keseluruhan inflasi di Kota Madiun masih terkendali selama lima tahun terakhir.

2.1.4. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Pengangguran merupakan salah satu fenomena ekonomi makro yang menjadi permasalahan pada setiap daerah, tidak terkecuali Kota Madiun. Di Kota Madiun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator pada penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, namun demikian permasalahan pengangguran sebenarnya merupakan persoalan yang menjadi tanggungjawab bersama lintas sektoral sehingga beberapa SKPD harus saling mendukung terhadap upaya pengurangan tingkat pengangguran terbuka ini. Kinerja pembangunan ekonomi di Kota Madiun juga bisa tercermin dari indikator tingkat pengangguran terbuka ini. Berikut merupakan gambaran mengenai perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun selama beberapa tahun terakhir.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015-2019



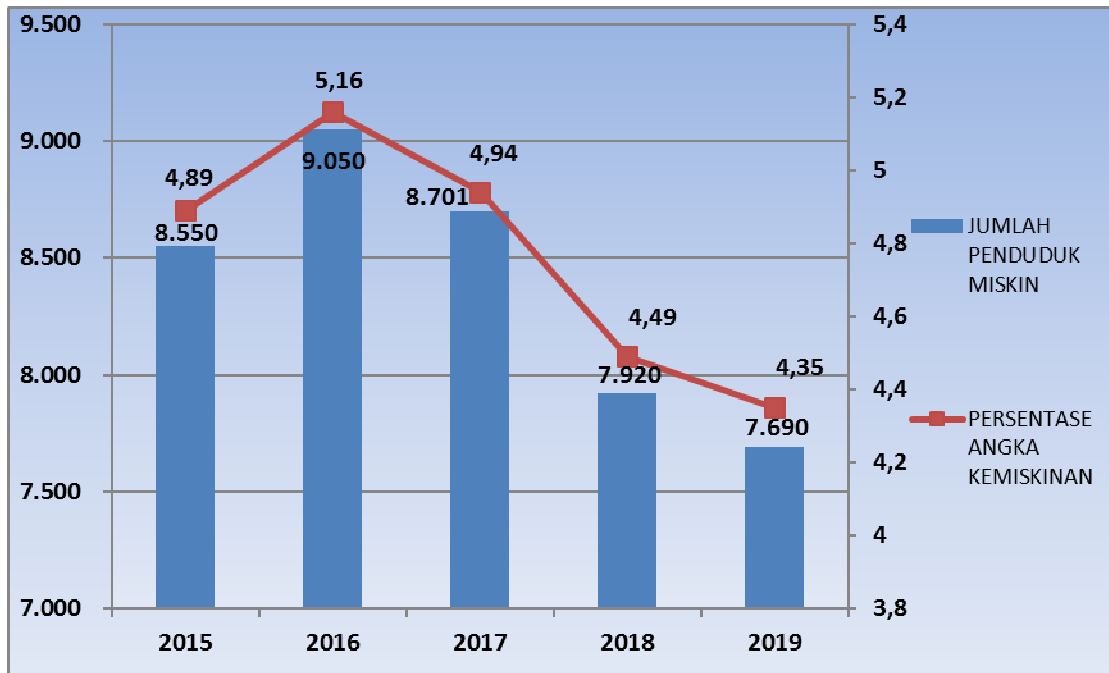
Sumber: RKPDTahun 2021

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, dimana pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,10 persen, pada akhir tahun 2016 mengalami kenaikan sedikit, menjadi 5,12 persen tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar 4,68 persen, dan tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan lagi menjadi 3,85. Sedangkan pada tahun 2019 TPT Kota Madiun mengalami kenaikan sedikit menjadi 4,01. Berdasarkan pada data tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun kecenderungannya mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2016 dan 2019 mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2017 dan 2018 kembali mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan kondisi perekonomian yang secara global dan Nasional yang memang mengalami penurunan yang berimbas pada ekonomi daerah kota Madiun.

2.1.5. KEMISKINAN)

Perkembangan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kota Madiun Tahun 2015-2019 dapat dilihat dibawah ini.

Tingkat Kemiskinan dan Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Madiun Tahun 2015 – 2019



Sumber: RKPD Tahun 2021*) Angka sementara

Dari gambar di atas dapat dilihat perkembangan prosentase penduduk miskin Kota Madiun mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami trend yang naik, pada tahun 2017 penduduk miskin di Kota Madiun sebesar 4,94% atau mengalami penurunan kembali, sedangkan pada Tahun 2018 semakin mengalami penurunan menjadi 4,49%. Dan di akhir tahun 2019 menurun lagi menjadi 4,35. Hal ini terjadi tidak hanya karena faktor lokal akan tetapi pengaruh regional, nasional bahkan global juga cukup besar. Pemerintah Kota Madiun sudah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

2.1.6. INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Indeks Kesehatan, Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Indeks PPP dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2015 s/d 2019

Indeks	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
IPM	79,48	80,01	80,13	80,33	80,88
Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Umur Harapan Hidup	72,41	72,44	72,48	72,59	72,75
Indeks Pengetahuan	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77
Harapan Lama Sekolah	14,06	14,19	14,20	14,21	14,39
Rata-rata Lama Sekolah	11,08	11,09	11,10	11,11	11,13
Indeks Pengeluaran	0,82	0,83	0,83	0,83	0,83
Pengeluaran per kapita (000 Rp)	14.723	15,300	15.415	15,616	16,040

Sumber: RKPD Tahun 2021*) Angka sementara

IPM Kota Madiun pada Tahun 2018 mencapai 80,33 atau naik sebesar 0,55 poin dibanding Tahun 2019 yang mencapai 80,88. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik. Kota Madiun masuk daerah dengan IPM sangat tinggi karena lebih dari 80.

2.1.7. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO KOTA MADIUN 2019

Dalam penentuan arah kebijakan ekonomi daerah, perlu memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian eksternal, karena kondisi perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian regional, nasional maupun global. Perkembangan kondisi perekonomian regional sangat terkait dengan kondisi perekonomian provinsi, nasional maupun dunia. Oleh karena itu, dalam penentuan arah kebijakan ekonomi daerah tentunya harus memperhatikan perkembangan dari kondisi perekonomian eksternal daerah. Pemerintah Kota Madiun telah mempertimbangkan dan memperhatikan perkembangan dari kondisi perekonomian eksternal daerah yakni keterkaitan dengan kondisi perekonomian provinsi, nasional bahkan perekonomian global. Karena diyakini bahwa kondisi eksternal akan memiliki pengaruh pada perekonomian Kota Madiun.

Berdasarkan kondisi perekonomian global, Nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka prospek dan prediksi perekonomian Kota Madiun pada tahun 2017-2018 dapat dilihat dalam indikator ekonomi dibawah ini.

Proyeksi Perekonomian Kota Madiun Tahun 2019 – 2021

KETERANGAN	Realisasi	Proyeksi	
	2019**)	2020	2021

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Pertumbuhan Ekonomi (%)	<i>5,81</i>	<i>6,01</i>	<i>6,09</i>
PDRB ADHB (juta rupiah)	<i>14.208,21</i>	<i>14.863,72</i>	<i>12.763,94</i>
PDRB ADHK (juta rupiah)	<i>10.635,46</i>	<i>10.925,63</i>	<i>98.236,19</i>
PDRB per Kapita (juta rupiah)	<i>79,7</i>	<i>81,23</i>	<i>83,52</i>
TPT (%)	<i>4,01</i>	<i>3,8</i>	<i>3,76</i>
IPM	<i>80,88</i>	<i>80,96</i>	<i>81,04</i>
Inflasi (%)	<i>2,2</i>	<i>4±1</i>	<i>4±1</i>
Kemiskinan	<i>4,35</i>	<i>4,28</i>	<i>4,13</i>

Sumber:RKPD Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun secara moderat pada tahun 2020 dan 2021 diproyeksikan akan mencapai 6,03 dan 6,09 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 diperkirakan menjadi 3,80 persen dan diharapkan terus menurun sampai 3,76 persen pada tahun 2021 sedangkan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar 80,96 dan terus meningkat sampai 81,04 pada tahun 2021.

Untuk mendukung capaian pertumbuhan ekonomi tersebut, maka ada beberapa strategi yang harus dilakukan agar target tersebut tercapai :

- a. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan peraturan investasi, sehingga dapat menarik para investor;
- b. Meningkatkan peran KUMKM melalui penguatan kelembagaan dan rumusan kebijakan yang aplikatif;
- c. Peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kearifan lokal
- d. Meningkatkan kapasitas SDM yang unggul
- e. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat
- f. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran
- g. Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di setiap kelurahan
- h. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing
- i. Pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri
- j. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

2.2.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

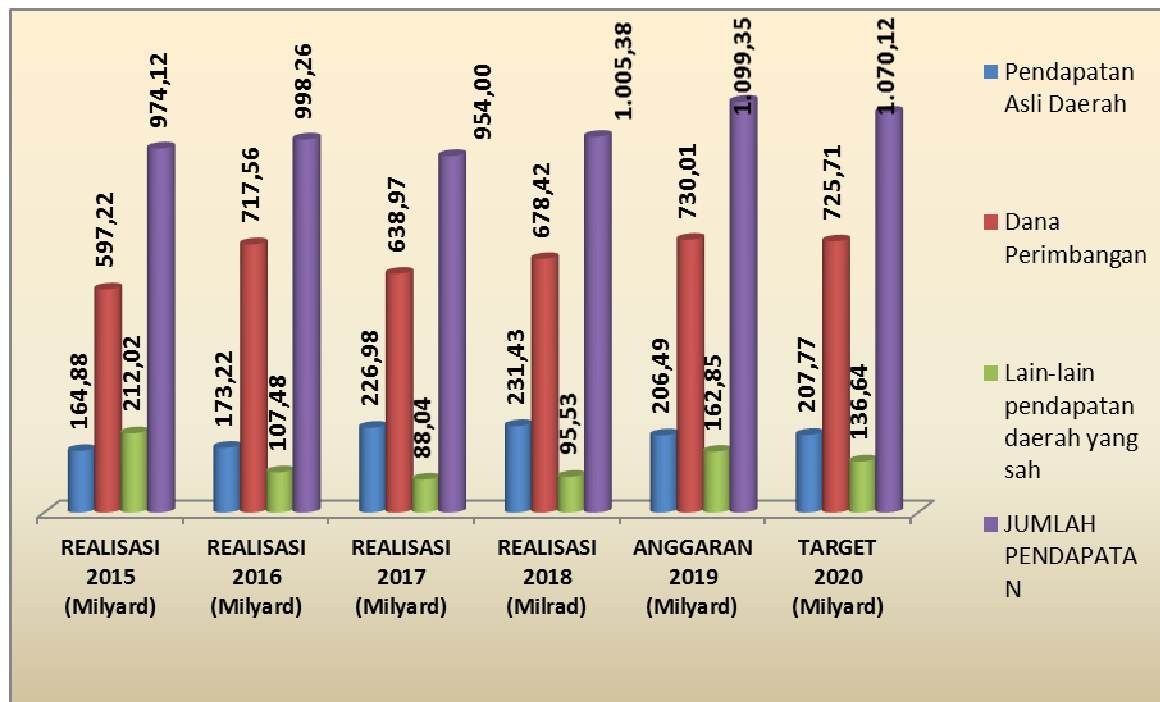
2.2.1.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah memberdayakan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah, selain itu otonomi daerah juga sebagai motivasi kuat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyikapi berbagai persoalan pemerintah dan pembangunan yang dihadapi, utamanya berkaitan dengan pembiayaan pembangunan daerah. Perkembangan realisasi penerimaan daerah dalam periode 2015-2018 dan proyeksi 2019-2020 menunjukkan

adanyatren kenaikan yang berasal dari kenaikan pendapatan daerah. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pertumbuhan pajak daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun rencana penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu (SiLPA) menunjukkan fluktuasi dan diupayakan diminimalisasi melalui efektivitas kegiatan dan akurasi perencanaan pendapatan. Peningkatan realisasi penerimaan tersebut, disamping merupakan hasil upaya Pemerintah Daerah, juga dipengaruhi oleh perkembangan kondisi makro ekonomi nasional dan daerah, factor eksternal, dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah.

2.2.1.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH

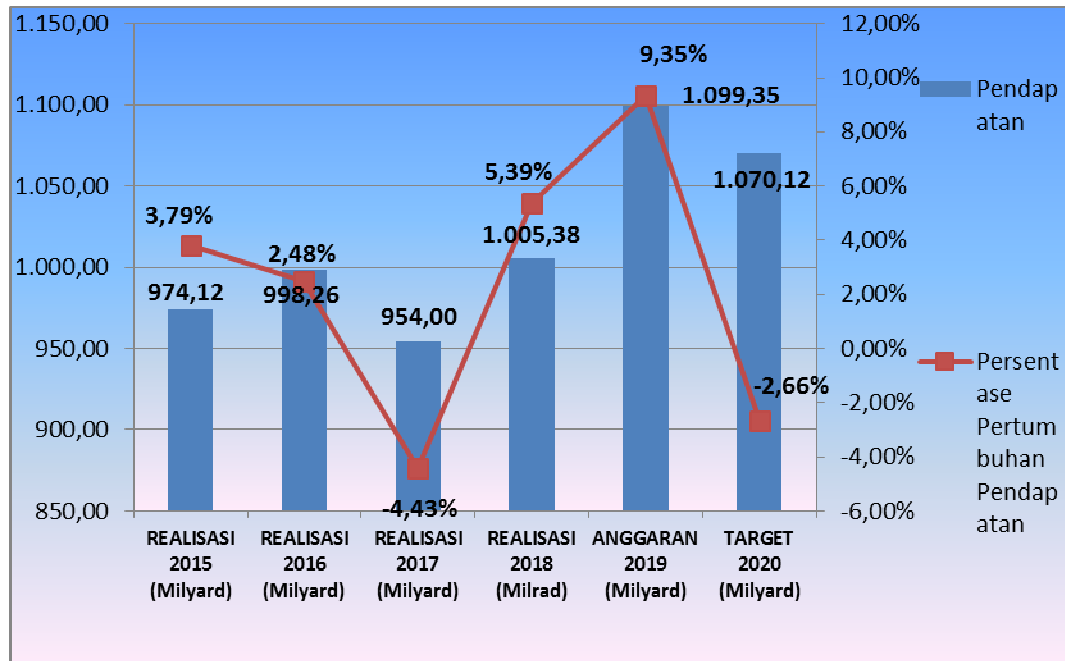
Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Dana Perimbangan (dana bagi hasil, DAU, DAK), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Setiap sumber pendapatan daerah memiliki porsi yang berbeda dalam menentukan besarnya pendapatan daerah. Adapun komponen pendapatan daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020, data diolah

Gambar 4.1
Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2015 – 2019, dan Target Tahun 2020

Dari gambar perkembangan pendapatan daerah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa dana perimbangan masih mendominasi pendapatan daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, nilainya jauh lebih rendah dibandingkan dengan dana perimbangan.

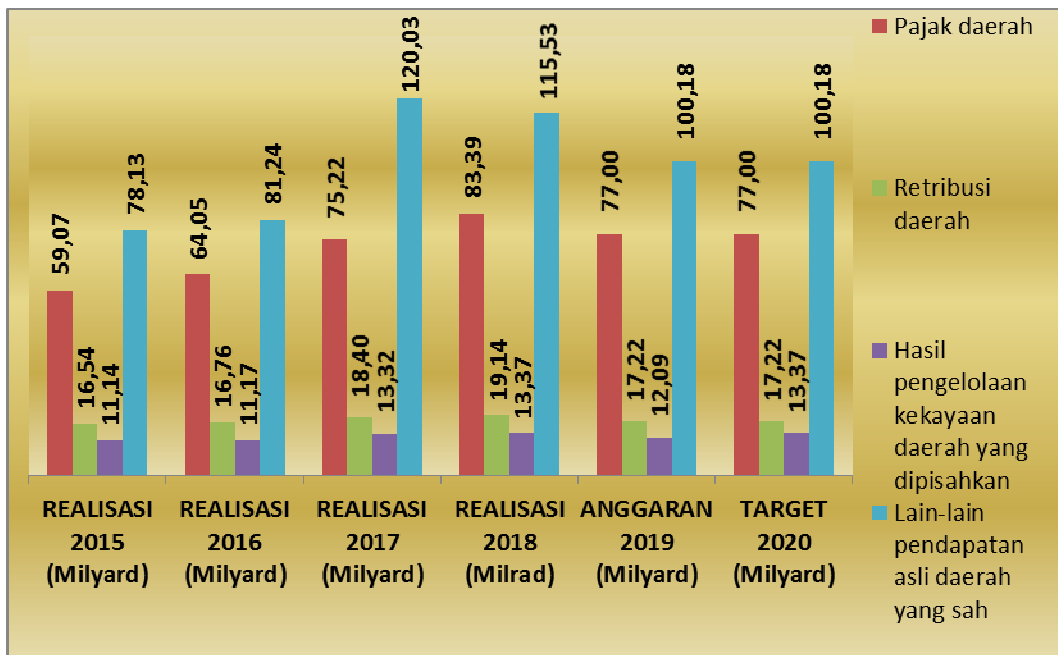


Sumber: BPKAD Kota Madiun 2019 data diolah

Gambar 4. 2
 Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2015 – 2019,
 dan Target Tahun 2020

Trend pendapatan daerah terus mengalami pertumbuhan setelah tahun 2015 walaupun pendapatan mengalami kenaikan namun pertumbuhannya mengalami fluktuatif, bahkan pada Tahun 2017 terjadi bukan pertumbuhan tapi penurunan sebesar 4,43% dan pada Tahun 2018 tumbuh lagi dengan kenaikannya sebesar 5,39 dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya perubahan regulasi yaitu dengan adanya perubahan kewenangan beberapa bidang urusan, pada Tahun 2019 tumbuh sebesar 9,35%, sedangkan pada tahun 2020 direncanakan mengalami penurunan pertumbuhan turun sebesar 2,66 %. Hal tersebut terjadi karena pada Tahun 2019 Kota Madiun mendapatkan alokasi dana bagi hasil pajak dari Provinsi sebesar Rp. 86.960.763.000,00 tapi pada Tahun 2020 hanya diproyeksikan sebesar Rp. 60.629.986.000,00, sehingga secara keseluruhan pendapatan menurun.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2019, data diolah

Gambar 4.33
Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 – 2019,
dan Target Tahun 2020

Dari gambar perkembangan pendapatan asli daerah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa pada tahun 2015 Lain-Lain PAD yang Sah mendominasi pendapatan asli daerah, yang sebelumnya didominasi oleh retribusi daerah. Selanjutnya pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 tetap didominasi oleh Lain-lain PAD yang Sah, karena RSUD dan puskesmas sudah menjadi BLUD, termasuk juga dana BOS, pendapatannya masuk di Lain-Lain PAD yang sah. Tetapi mulai Tahun 2019 Dana Bos ada perubahan posting lagi menjadi Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum, komponen PAD Kota Madiun memiliki tren yang fluktuatif. Meskipun begitu, sampai tahun 2020 target PAD Kota Madiun terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya (tahun anggaran 2019) dimana pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar 206,49 milyar rupiah sedangkan pada Tahun 2020 diproyeksikan sebesar 207,77 milyar rupiah..

Tabel 4.1
Peta Potensi Pajak Daerah

URAIAN	JUMLAH					
	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	ANGGARAN 2019	TARGET 2020
PAJAK DAERAH	58.947.358.145,57	64.045.559.079,36	75.224.831.585,44	83.454.704.361,41	77.000.000.000,00	77.000.000.000,00
Pajak Hotel	3.044.170.867,00	3.997.471.040,00	4.974.716.454,00	6.194.574.076,00	5.515.000.000,00	5.515.000.000,00
Pajak Restoran	4.931.423.995,02	5.564.700.875,66	7.184.100.061,77	9.105.087.235,13	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00
Pajak Hiburan	972.498.837,75	1.197.021.728,00	1.303.023.863,00	1.193.681.396,00	1.035.000.000,00	1.035.000.000,00
Pajak Reklame	2.639.318.160,00	2.629.612.677,50	2.774.982.703,00	2.786.643.986,33	2.475.000.000,00	2.475.000.000,00
Pajak Penerangan Jalan	15.759.796.695,18	16.443.170.206,10	18.503.214.981,13		19.300.000.000,00	

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

				19.722.287.098,64		19.300.000.000,00
Pajak Parkir	606.856.500,00	935.730.053,00	1.349.788.267,00	1.619.842.220,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
Pajak Air Tanah	292.048.326,00	299.662.989,00	302.830.125,54	314.745.611,31	275.000.000,00	275.000.000,00
BPHTB	15.504.389.744,66	15.078.722.102,10	20.375.963.778,00	21.964.631.908,00	20.250.000.000,00	20.250.000.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan	15.196.855.019,96	17.899.467.408,00	18.456.211.352,00	20.553.210.830,00	18.250.000.000,00	18.250.000.000,00

**Tabel 4.2
Peta Potensi Retribusi Daerah**

URAIAN	JUMLAH					
	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	ANGGARAN 2019	TARGET 2020
RETRIBUSI DAERAH	19.294.416.013,00	16.759.131.793,00	18.407.218.016,50	19.142.589.648,50	17.220.952.600,00	18.404.147.516,50
Retribusi Jasa Umum	8.719.724.627,00	5.537.338.554,00	5.700.049.705,00	6.491.235.071,00	6.986.250.000,00	6.986.250.000,00
Retribusi Jasa Usaha	8.252.975.774,00	9.545.015.239,00	11.049.012.811,50	10.735.007.477,50	8.734.702.600,00	8.734.702.600,00
Retribusi Perijinan Tertentu	2.321.715.612,00	1.676.778.000,00	1.658.155.500,00	1.916.347.100,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00

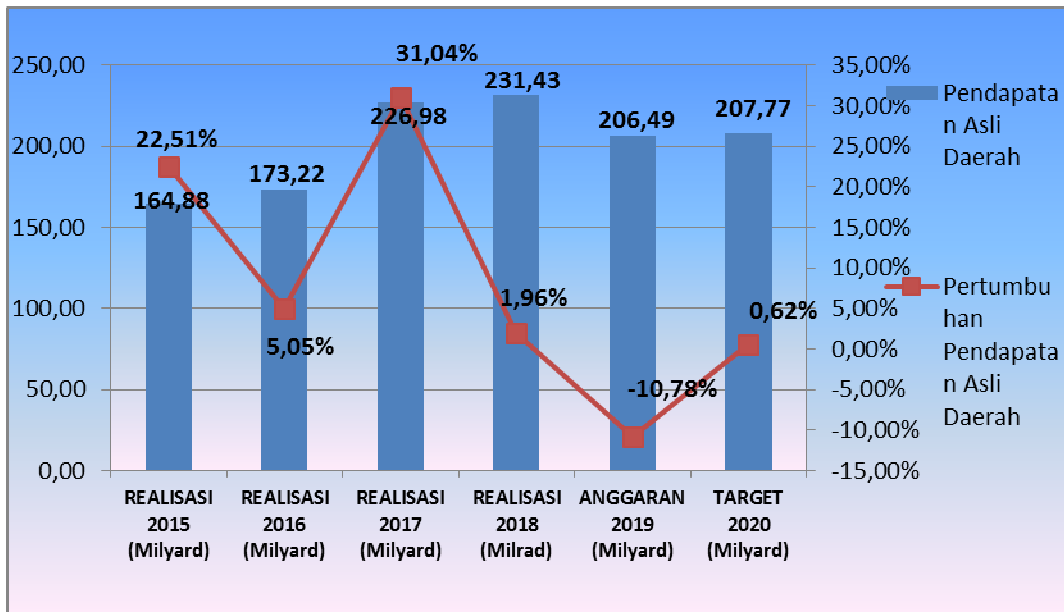
**Tabel 4.3
Peta Potensi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

URAIAN	JUMLAH					
	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	ANGGARAN 2019	TARGET 2020
HASIL PENGE. KEKAYAAN DAERAH Y.G DIPISAHKAN	9.621.407.000,00	11.172.031.994,51	13.320.249.415,28	13.365.402.573,59	12.086.991.000,00	13.365.401.000,00
Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.177.051.000,00	5.407.261.633,51	7.469.677.821,00	7.453.161.342,89	6.174.750.000,00	7.453.160.000,00
Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.444.356.000,00	5.764.770.361,00	5.850.571.594,28	5.912.241.230,70	5.912.241.000,00	5.912.241.000,00

**Tabel 4.4
Peta Potensi Lain-Lain PAD Yang Sah**

URAIAN	JUMLAH					
	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	ANGGARAN 2019	TARGET 2020
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	78.052.594.935,25	81.238.812.173,93	123.656.418.351,81	106.914.058.000,00	87.367.111.000,00	100.180.881.000,00
Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	18.372.000,00	57.389.000,00	526.282.126,00	1.228.868.784,00	17.500.000,00	17.500.000,00
Penerimaan Jasa Giro	17.895.507.961,25	9.865.639.654,18	4.899.121.759,45	1.834.248.837,16	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Pendapatan Bunga Deposito	0,00	0,00	9.367.745.843,24	14.890.136.985,44	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
Tunttan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan	0,00	0,00	1.538.160.254,90	329.598.270,00	0,00	0,00
Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	0,00	38.708.900,00	45.058.566,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	120.526.799,58	133.896.720,88	120.021.113,74	126.325.374,67	100.000.000,00	100.000.000,00
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan/Penjualan	155.503.608,00	1.260.926.825,71	110.091.218,00	77.033.072,00	192.000.000,00	192.000.000,00
Pendapatan Lain-Lain	940.308.367,00	1.523.564.299,00	6.680.691.830,74	1.624.362.426,04	0,00	0,00
BLUD	58.922.376.199,42	68.397.395.674,16	80.473.662.542,47	94.906.050.027,92	89.371.381.000,00	89.371.381.000,00
Dana Bos	0,00	0,00	19.897.982.763,27	19.356.661.000,00	0,00	0,00

Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun kurun waktu enam tahun terakhir sebagai berikut.

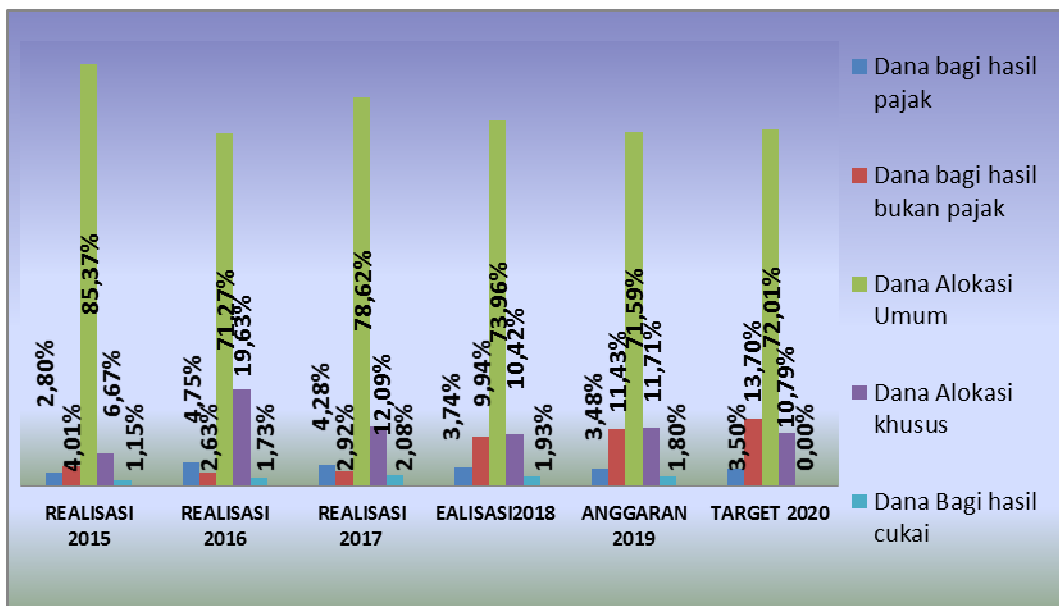


Sumber: BPKAD Kota Madiun 2019 data diolah

Gambar 4. 4
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 – 2019, dan Target Tahun 2020

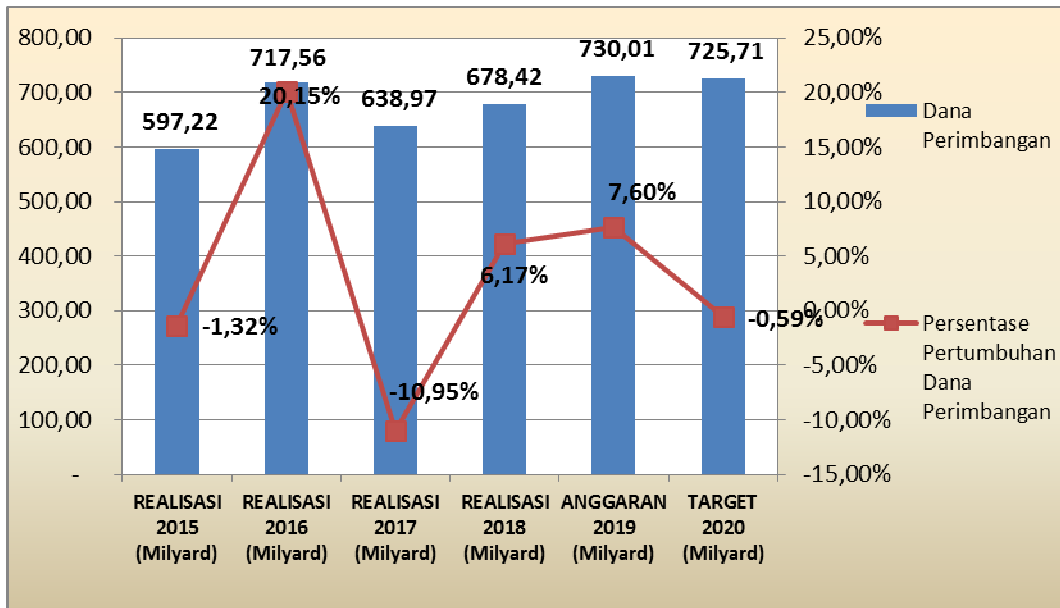
2. Dana Perimbangan

Dari gambar perkembangan pendapatan dana perimbangan Kota Madiun di bawah, terlihat bahwa dana perimbangan masih didominasi oleh dana alokasi umum yang memang salah satunya diperuntukkan gaji pegawai serta pembangunan.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2019 data diolah

Gambar 4.5
 Persentase Komponen Dana Perimbangan Tahun 2015 – 2019,
 dan Proyeksi Tahun 2020



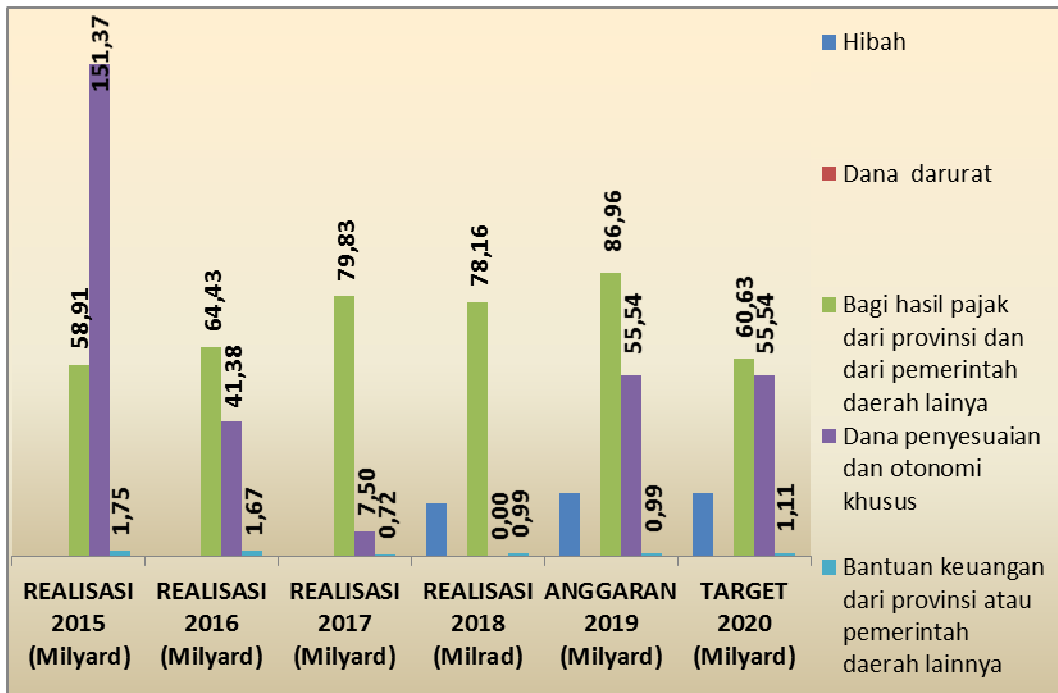
Sumber: BPKAD Kota Madiun 2019 data diolah

Gambar 4.6
 Persentase Pertumbuhan Dana Perimbangan Tahun 2015 – 2019,
 dan Target Tahun 2020

Dana perimbangan masih merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam pendapatan daerah di Kota Madiun. Menandakan bahwa tingkat kemandirian Kota Madiun masih perlu untuk ditingkatkan. Hal ini dibuktikan dengan persentase jumlah komponen Dana Perimbangan yang lebih besar dibandingkan dengan komponen Pendapatan Daerah yang lain. Tren penerimaan dana perimbangan mengalami fluktuatif dan penerimaan dana perimbangan tertinggi terjadi di Tahun 2017.

Pada tahun 2020 dana perimbangan diproyeksikan sebesar 725,71 milyar, sedikit lebih kecil dari Anggaran 2019 yaitu sebesar 730,01 milyar tapi masih lebih besar dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 678,42 milyar. Hal ini terjadi adanya penurunan pada dana alokasi khusus (DAK), karena untuk DAK fisik berdasarkan usulan di aplikasi KRISNA adanya penurunan usulan yang disetujui di aplikasi, kemudian juga ada perubahan posting Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang semua berdiri sendiri sekarang menjadi bagian dana bagi hasil bukan pajak.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

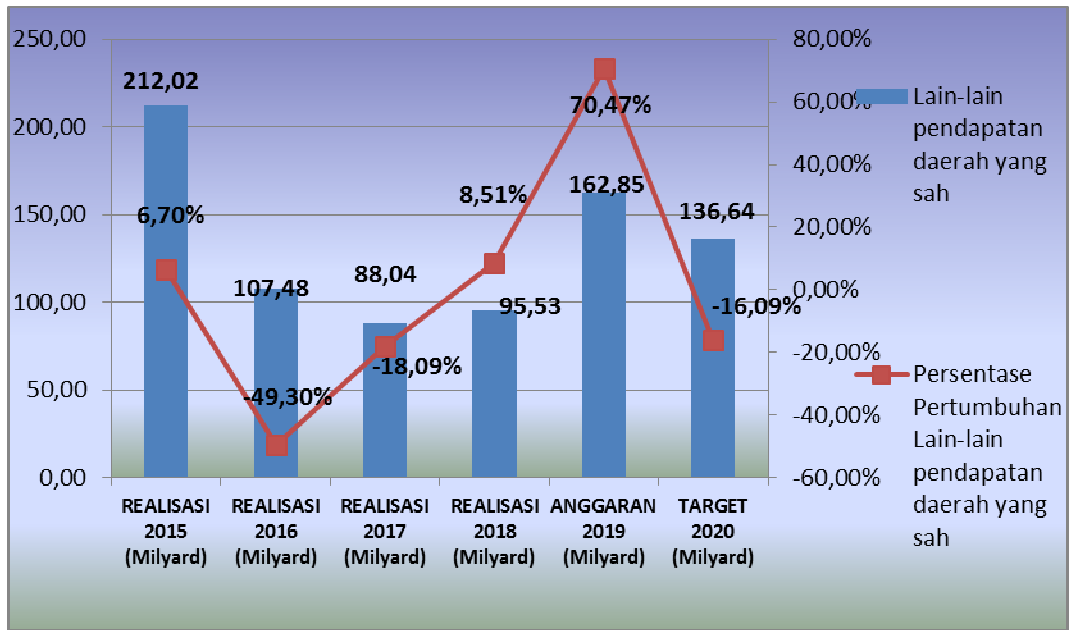


Sumber: BPKAD Kota Madiun 2019 data diolah

Gambar 4.7

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2015 – 2019, dan Target Tahun 2020

Dari gambar perkembangan pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa dana penyesuaian dan otonomi khusus mendominasi mulai sebelum Tahun 2015 sampai tahun 2015, hal ini disebabkan karena dana penyesuaian dan otonomi khusus salah satunya diperuntukkan menggaji tunjangan sertifikasi guru. Mulai Tahun 2018 dana penyesuaian otonomi khusus khususnya untuk sertifikasi guru sudah dipindah ke dana perimbangan. Sehingga pada Tahun 2018 komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya ada tiga yaitu dana hibah (BOS), dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, pada tahun 2019 ditambah Dana Penyesuaian Otonomi Khusus yaitu berupa Dana Insentif Daerah. Pada Tahun 2020 Dana Insentif Daerah diproyeksikan sama dengan Tahun 2019.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2019 data diolah

Gambar 4.8
 Persentase Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 Tahun 2015 – 2019, dan Target Tahun 2020

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 136,64 milyar, mengalami penurunan yang signifikan sebesar 16,09% persen dari anggaran tahun 2019, karena adanya penurunan dana bagi hasil dari provinsi.

2.2.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

2.2.2.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kota Madiun yang tertuang dalam RKPD 2019 pada intinya mempertimbangkan (1) visi Kota Madiun dalam RPJMD (2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jawa Timur; (3) isu-isu strategis daerah ; dan (4) evaluasi capaian kinerja RKPD Kota Madiun tahun 2018 . Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan tujuan serta sasaran pembangunan maka tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2019 adalah “Peningkatan Kemandirian ekonomi dan daya saing daerah melalui optimalisasi Potensi ekonomi lokal dan pelayanan publik yang prima”.

Pengambilan tema ini didasarkan pada kondisi eksisting Kota Madiun dimana semakin pentingnya kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang ditopang sumber daya manusia atau tenaga kerja yang handal, pengentasan kemiskinan dan oleh pengembangan ekonomi local melalui pengembangan industry kecil dan menengah. Selain itu, penyiapan sumber daya manusia yang handal melalui pelayanan prima di bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur kota merupakan focus dari tahun ketiga RPJMD Kota Madiun 2014-2019.

Mengacu kepada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun serta dengan memperhatikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Madiun, maka Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2019 menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendidikan.
 - b. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kesehatan
 - c. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah
 - d. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
 - e. Peningkatan Pelayanan Publik
 - f. Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Kota untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
- Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah tersebut dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah

2.3. TARGET KINERJA APBD

Sebagai bentuk dari anggaran berbasis kinerja maka setiap pengeluaran belanja daerah harus memiliki kejelasan hasil dengan ditetapkannya target-target capaian pada setiap program dan kegiatan dari urusan pemerintah. Secara ringkas target pencapaian kinerja tahun anggaran 2019 pada setiap urusan pemerintahan.

2.3.1. URUSAN WAJIB

Urusan wajib di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 23 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini, Selain itu terbagi juga menjadi dua urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib tidak pelayanan dasar.

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Urusan Sosial

b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Urusan Pangan
4. Urusan Pertanahan
5. Urusan Lingkungan Hidup
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Urusan Perhubungan
9. Urusan Komunikasi dan Informatika
10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11. Urusan Penanaman Modal
12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
13. Urusan Statistik
14. Urusan Persandian
15. Urusan Kebudayaan
16. Urusan Perpustakaan
17. Urusan Kearsipan

2.3.2. URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 6 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. Urusan Kelautan dan Perikanan
2. Urusan Pariwisata
3. Urusan Pertanian
4. Urusan Perdagangan
5. Urusan Perindustrian
6. Urusan Transmigrasi

2.3.3 URUSAN PENUNJANG

Urusan penunjang di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 8 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. Unsur Staf (Sekretariat Daerah)
2. Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Perencanaan
5. Keuangan
6. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
7. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8. Kecamatan

2.3.3. TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Target kinerja keuangan untuk urusan wajib dan urusan pilihan pada masing-masing SKPD disajikan dalam lampiran laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Daerah Kota Madiun.